

**ANALISIS DETERMINAN EKONOMI KORUPSI DI
ERA DESENTRALISASI PADA 12 IBUKOTA
PROVINDI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**MOHAMMAD REZA HAFIZ AKBAR
0910210072**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS DETERMINAN EKONOMI KORUPSI DI ERA DESENTRALISASI PADA 12 IBUKOTA PROVINSI INDONESIA

Yang disusun oleh :

Nama : Mohammad Reza Hafiz Akbar
NIM : 0910210072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Juli 2013

Malang, 30 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

Prof. Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc., Ph.d

NIP. 19730322 199702 001

Analisis Determinan Ekonomi Korupsi di Era Desentralisasi pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia

Mohammad Reza Hafiz Akbar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email: rzahfz@gmail.com

ABSTRACT

In general, corruption is the use of public office position for personal gain. Indonesia is one of the countries that often becomes laboratories for research about corruption. Decentralization brings corruption which was centralized previously into being spreaded to some areas. Many researchers are trying to find the determinants of economic corruption from an economic standpoint. This study aims to explore the economic determinants of corruption in 12 provincial capital of Indonesia in 2004, 2006, 2008, and 2010. Variables argued to be determinants of corruption in this study are the GDP per capita, economic growth, government expenditure, and tax. The analysis technique used is the Tobit regression using panel data. The results show that the GDP per capita and economic growth affect negatively and significant on the probability level of corruption. Meanwhile, government spending and taxes do not affect the probability of corruption. The higher level of GDP per capita and economic growth are do not guarantee that the level of corruption will be reduced. Corruption is latent, making it difficult to determine the cause, if only seen from the figures. Further research is needed both theoretically and empirically to analyse the determinants for corruption in the era of decentralization in Indonesia..

Keywords: Corruption, PDRB per capita, Economic growth, Government expenditure, Tax, Tobit regression, 12 provincial capital, Indonesia

ABSTRAK

Secara umum korupsi adalah penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi laboratorium penelitian korupsi. Desentralisasi membawa korupsi yang tadinya terpusat menjadi menyebar ke daerah-daerah. Banyak peneliti ekonomi mencoba untuk mencari determinan korupsi dari sudut pandang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari determinan ekonomi korupsi pada 12 ibukota provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010. Variabel-variabel yang diduga menjadi determinan korupsi dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi Tobit menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas tingkat korupsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah dan pajak tidak berpengaruh terhadap probabilitas tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi tidak menjamin bahwa tingkat korupsi akan berkurang. Korupsi adalah hal yang bersifat laten, sehingga sulit untuk mencari penyebabnya jika hanya dilihat dari angka. Diperlukan penelitian lebih mendalam baik secara teoritis maupun empiris dalam mencari determinan korupsi pada era desentralisasi di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, PDRB per kapita, Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Pajak, Regresi Tobit, 12 Ibukota provinsi, Indonesia

A. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah gejala bahwa telah terjadi sesuatu yang salah dalam manajemen negara. Institusi-institusi yang dirancang untuk mengatur hubungan antara negara dan penduduk malah digunakan untuk memperkaya diri dan mendapat tambahan keuntungan bagi yang korup. Mekanisme harga, hal yang begitu sering menjadi sumber efisiensi ekonomi dan penyumbang bagi pertumbuhan, dapat dalam bentuk suap, mengurangi legitimasi dan efektivitas pemerintahan (Rose-Ackerman, 2006:11).

Berbicara tentang korupsi, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mendapatkan perhatian dari berbagai pakar ataupun *think-tank*. Hal ini dibuktikan bahwa dalam hampir seluruh survei tentang korupsi, Indonesia selalu ditempatkan sebagai salah satu negara yang dianalisis. Kondisi ini seperti pedang bermata dua, di satu sisi Indonesia dipandang mempunyai posisi penting di dunia baik dari sisi ekonomi maupun politik. Di sisi lain, Indonesia juga dipandang sebagai satu negara korup dan dianggap sebagai laboratorium ideal bagi para pakar dan penggiat antikorupsi (Wijayanto dan Zahedie, 2009:62).

Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa pada 2011 Indonesia berada pada peringkat 100 dari 182 negara yang disurvei dengan *Corruption Perception Index* (CPI) 3,0. Apabila dilihat pada tahun sebelumnya indeks dan peringkat Indonesia mengalami peningkatan. CPI pada 2010 sebesar 2,8 yang artinya terdapat peningkatan poin senilai 0,2. Sedangkan dilihat dari peringkat, posisi Indonesia bergerak dari peringkat 110 ke peringkat 100 dari 176 negara yang disurvei. CPI Indonesia sendiri dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dan masih pasang surut. Penguatan persepsi korupsi dalam sepuluh tahun hanya berkisar antara 0,1 sampai 0,2 poin saja, bahkan pada 2006-2007 sempat melemah 0,1 poin. Hal ini mengindikasikan dalam pemerintahan Presiden Megawati (2001-2004) sampai kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang) masalah korupsi di Indonesia belum teratasi dengan serius dan maksimal.

Lahirnya UU No.22/1999 yang kemudian digantikan dengan UU No.34 tahun 2004 merupakan salah satu titik tolak yang memaksa pemerintah pusat yang ada di Jakarta untuk membagi kekuasaan dan sumber daya kepada daerah. Kekuasaan, kewenangan dan aset ekonomi yang didominasi secara sentral dari Jakarta, kini terdistribusi ke daerah-daerah. transisi desentralisasi ternyata tidak sepenuhnya memberi kegembiraan dan euforia masyarakat. Semua orang berharap bahwa desentralisasi akan mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik, mendekatkan dan memperbaiki kualitas layanan publik, memperbaiki kinerja birokrasi, memberdayakan masyarakat, memberantas korupsi dan lain-lain. Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Demokratisasi dan otonomi daerah menyuguhkan kebangkitan raja-raja kecil di daerah, memindahkan korupsi dari Jakarta ke daerah, konflik kewenangan dan sumberdaya, pelipatgandaan pajak dan retribusi daerah (Gunawan., *et al*, 2005:47).

Dalam menghadapi fenomena tersebut para pegiat antikorupsi selalu mencari jalan agar korupsi yang ada di wilayah-wilayah Indonesia dapat tereduksi sehingga semangat dan impian desentralisasi dan otonomi daerah menuju kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Semangat tersebut salah satunya dengan mengeluarkan indeks persepsi korupsi. Salah satu indeks yang mengukur persepsi korupsi antar daerah/kota di Indonesia adalah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2010 menunjukkan bahwa Ibukota Provinsi cenderung dipersepsikan memiliki inidikasi korup yang lebih besar ketimbang kota-kota lainnya.

Isu mengenai korupsi menjadi salah satu topik hangat bagi para ekonom untuk menganalisis fenomena korupsi dilihat dari kacamata ilmu ekonomi. Para ilmuwan ekonomi berfokus pada masalah korupsi yang lebih luas dan masuk akal dari sudut pandang ekonomi. Mereka mencoba untuk mencari tahu tingkatan korupsi di beberapa negara dan faktor penyebab korupsi (Shabbir dan Anwar, 2007:1-8). Adaman, Çarkoglu dan Senalatar (2001) dalam Yilmaz dan Akiv (2011:161) mengatakan bahwa terdapat paparan multidimensional yang dapat menggambarkan penyebab ekonomi dari korupsi. *Pertama*, pembangunan atau pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai faktor dasar yang dapat menyebabkan korupsi. *Kedua*, selain faktor dasar tersebut, terdapat beberapa faktor ekonomi lainnya yang menyebabkan korupsi. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa regulasi pemerintah, peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, inflasi, sistem pajak serta kebebasan ekonomi merupakan faktor-faktor ekonomi yang berpotensi menyebabkan korupsi.

Penelitian ini mencoba melihat determinan ekonomi korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada tahun 2004, 2006, 2008 dan 2010. Untuk melihat variabel-variabel ekonomi yang diduga menjadi determinan korupsi peneliti menggunakan variabel dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu PDRB per kapita (Rehman dan Naveed, 2006:27-59; Yilmaz dan Akiv, 2011:161-169; ElBahnasawy dan Revier, 2012:312-313; Silaen dan Sasana, 2013:1-6), pertumbuhan ekonomi (Ali dan Isse, 2003:449-466; Rehman dan Naveed, 2006:27-59; Hoa, 2010:158-163; Yilmaz dan Akiv, 2011:161-169), pengeluaran pemerintah (Ali dan Isse, 2003:449-466; Del Monte dan Papagni, 2007:379-396) serta pajak (Rehman dan Naveed, 2006:27-59; Silaen dan Sasana, 2013:1-6). Variabel yang telah diuji oleh penelitian terdahulu itu selanjutnya akan digunakan untuk mencoba melihat fenomena korupsi di ibukota-ibukota provinsi. Data yang dapat diakses oleh peneliti berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dipublikasikan oleh *Transparency International* Indonesia dari 2004, 2006, 2008 dan 2010. Pada publikasi tersebut peneliti menentukan Ibukota provinsi yang dari 2004, 2006, 2008 dan 2010 masuk ke dalam survei. Hal ini dikarenakan tidak semua Ibukota provinsi di Indonesia masuk dalam survei *Transparency International* Indonesia sejak 2004, 2006, 2008 dan 2010.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pajak terhadap korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dan Pengukuran Korupsi

Menurut *Transparency International* Indonesia dalam menyusun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi. Definisi di atas senada dengan apa yang dimaksud oleh Klitgaard., *et all* (2002:2) bahwa dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Lebih lanjut Klitgaard., *et all* (2002:3) mengatakan bahwa apapun definisi yang digunakan, korupsi bila telah mencapai tingkat *hypercorruption*, akan membawa dampak yang mematikan. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan dan; kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Korupsi adalah salah satu aktivitas yang sulit untuk diukur. Orang yang melakukan korupsi cenderung untuk menutupi tindakannya. Dalam memerangi korupsi lembaga-lembaga antikorupsi di dunia mulai mencoba untuk mengkuantifikasi korupsi dengan membuat survei-survei kepada responden ahli. Responden tersebut biasanya berasal dari kalangan pebisnis dan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, *Transparency International* Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempublikasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kota-kota di Indonesia sejak tahun 2004. IPK Indonesia menggunakan metode survei persepsi dengan pendekatan kuantitatif. IPK merupakan rata-rata dari total pengukuran variabel dari masing-masing kota, ditampilkan dengan bentuk skor. Rentang indeks adalah antara 0-10, dengan 0 berarti dipersepsikan sangat korup, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Desentralisasi dan Korupsi

Menurut Halim dan Mujib (2009:1) desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang. Pada hakikatnya, desentralisasi adalah upaya untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada di daerah (kota/kabupaten) agar dapat memberi keuntungan dan kesejahteraan pada masyarakat. Impian akan desentralisasi dan otonomi daerah seakan menjadi pertanda lolos dari jerat kemelaratan dan ketidakseimbangan daerah-daerah di Indonesia selama kurang lebih 30 tahun. Namun, pada kenyataannya desentralisasi yang diimpikan tersebut tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidaksiapan daerah dan ketidaklengkapan regulasi menimbulkan kegaduhan dan masalah. Kegaduhan dan masalah tersebut salah satunya tercermin dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pada kasus Indonesia memperlihatkan hal tersebut, di mana desentralisasi sampai kini bukannya mengurangi watak sentralisasi, tetapi malah menyuburkan perilaku dan praktik tersebut dalam area yang lebih kecil, sehingga penyakit-penyakit semacam korupsi dan kolusi semakin parah. Jika pada masa

sebelumnya karakter KKN bersifat mengerucut ke bawah (vertikal) dengan institusi bagian atas mengambil bagian yang paling besar, maka sejak otonomi daerah watak KKN lebih bersifat menyebar (horizontal) dengan setiap lini penyelenggara pemerintah (daerah) mengambil bagian yang sama (Yustika, 2008:15-16).

Fenomena korupsi di era desentralisasi menjadi salah satu ketertarikan bagi para peneliti untuk meneliti secara empiris hubungan korupsi dan desentralisasi. Hasil penelitian Fisman dan Gatti (2000:325-345) menemukan bahwa desentralisasi fiskal pada aspek pengeluaran pemerintah, secara signifikan dapat mengurangi korupsi. Namun hasil tersebut dapat berlaku apabila kebijakan desentralisasi fiskal tersebut diikuti dengan sistem hukum yang baik pada suatu negara. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Arikan (2004:175-195) yang melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi pada 40 negara. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat korupsi cenderung rendah pada negara yang menerapkan sistem desentralisasi fiskal dengan baik. Bagaimanapun, Arikan sendiri mengakui bahwa hasil penelitian empirisnya tidak begitu kuat. Lessman dan Markwardt (2009:631-646) mencoba melihat dampak desentralisasi pada korupsi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pada negara yang menerapkan pengawasan (*monitoring*) sistem desentralisasi dengan efektif, kompetisi dalam desentralisasi memberi pengaruh positif atas pengurangan korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, jika pengawasan (*monitoring*) tidak terlaksana dengan baik dapat mengakibatkan efek negatif seperti pelipatgandaan keuntungan marjinal yang berarti menambah korupsi.

Hubungan PDRB per kapita dan Korupsi

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun, sehingga angka pendapatan perkapita sering dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk suatu wilayah bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada penelitian ini PDRB per kapita yang digunakan adalah menurut harga berlaku. Pada tataran empiris, PDRB per kapita merupakan salah satu variabel yang menjadi determinan korupsi.

Yilmaz dan Akiv (2011:161-169) meneliti variabel pembangunan ekonomi yang dilihat dari GDP per kapita untuk mencari determinan korupsi di 25 negara Eropa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi (GDP per kapita) secara statistik signifikan menjadi determinan korupsi. Membaiknya perekonomian masyarakat Eropa yang dilihat dari meningkatnya GDP per kapita dapat menurunkan indeks korupsi. Hal ini berarti ketika sebuah negara sedang mengalami kemandekan ekonomi (GDP per kapita) turun, maka kemungkinan terjadi korupsi di negara tersebut akan meningkat, meskipun negara itu adalah negara maju.

Silaen dan Sasana (2013:1-6) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PDRB per kapita positif dan signifikan terhadap korupsi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti PDRB per kapita memiliki pengaruh terhadap korupsi yang diikuti dengan adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi, karena yang dikorupsi semakin besar.

PDRB per kapita dan korupsi tidak dapat secara langsung dihubungkan. Pada beberapa studi PDRB per kapita merupakan *proxy* (keterwakilan) dari pembangunan ekonomi, kesejahteraan, bahkan demokrasi. Hal ini membuat pembahasan mengenai hubungan PDRB per kapita dan korupsi tidak dapat dijelaskan langsung, tetapi PDRB per kapita dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, kesejahteraan serta demokrasi.

Hipotesis 1: Variabel PDRB per kapita (X1) diduga berpengaruh terhadap korupsi (Y) di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Korupsi

Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat secara umum gambaran kemampuan suatu daerah dalam menyuplai berbagai kebutuhan ekonomi masyarakatnya adalah tersedianya angka pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan turun naiknya angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada satu periode secara kasar dapat memberikan gambaran presentase dan suksesnya suatu daerah dalam mengendalikan dan membina berbagai kegiatan ekonomi (Safi'i, 2008:163). BPS melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan mengukur tingkat laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu (BPS, 2011:68).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel yang sering diikuti dalam menganalisis determinan ekonomi korupsi. Hal ini diasumsikan bahwa semakin tumbuh perekonomian sebuah negara, maka kecenderungan untuk melakukan praktik korupsi akan

menurun. Namun, pada beberapa penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh Ali dan Isse (2003:449-466), Rehman dan Naveed (2006:27-59) serta Yilmaz dan Akiv (2011:161-169), variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi korupsi dalam suatu negara. Meskipun begitu peneliti tetap mengikutsertakan variabel pertumbuhan ekonomi ini untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan dugaan korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan korupsi tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan pertumbuhan ekonomi dijadikan *proxy* kemampuan suatu daerah untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki, investasi dan infrastruktur. Semakin baik pengelolaan sumber daya dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah. Keuntungan daerah yang semakin besar ini dapat menjadi indikasi terjadinya korupsi. Terkait dengan hal tersebut dana investasi, baik dari lokal maupun asing serta pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi daerah dapat menjadi pos-pos terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi disini tidak dapat dilihat secara tunggal, namun perlu dikaitkan atau diwakilkan (*proxy*) dengan beberapa faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hipotesis 2: Variabel pertumbuhan ekonomi (X2) diduga berpengaruh terhadap korupsi (Y) di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Korupsi

Pengeluaran pemerintah atau juga sering disebut dengan belanja pemerintah merupakan total konsumsi pemerintah selama satu periode. Pada tataran empiris, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu determinan korupsi. Del Monte dan Papagni (2007:379-396) dalam penelitian empirisnya mencoba melihat pengeluaran pemerintah sebagai variabel determinan korupsi. Pengeluaran pemerintah dilihat dari infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur tidak mempengaruhi korupsi. Sedangkan pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa menunjukkan hasil yang positif dan signifikan menyebabkan korupsi di Italia.

Hubungan pengeluaran pemerintah dan korupsi dalam penelitian ini dilihat dari pengeluaran pemerintah daerah terhadap barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah disini diposisikan sebagai *proxy* terhadap pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan hal tersebut, diduga terdapat *mark-up* atau *mark-down* nominal anggaran belanja barang dan jasa yang terdapat dalam laporan APBD. Berdasarkan beberapa studi maupun temuan, didapatkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat berakibat pada postur anggaran APBD. Hal ini berkaitan anggaran belanja barang dan jasa tersebut bisa saja naik dari tahun ke tahun, namun kenaikan tersebut bukan berdasarkan kebutuhan daerah tetapi untuk dikorupsi.

Hipotesis 3: Variabel pengeluaran pemerintah (X3) diduga berpengaruh terhadap korupsi (Y) di 12 Ibukota Provinsi di Indonesia pada 2004, 2006, 2008 dan 2010

Hubungan Pajak dan Korupsi

Dalam UU No.28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah (PAD) yang terbesar. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Suparmoko, 2002:56). Salah satu penelitian empiris yang dilakukan oleh Silaen dan Sasana (2013:1-6) menemukan bahwa pajak daerah merupakan salah satu variabel determinan korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitiannya, pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Hal itu memiliki arti bahwa semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka akan semakin tinggi pula korupsinya.

Hubungan pajak dan korupsi dalam penelitian ini dilihat dari pajak daerah secara agregat. Artinya total pajak daerah yang berasal dari komponen-komponen pembentuk pajak daerah kabupaten/kota, seperti pajak hotel, restoran, penerangan jalan dan sebagainya. Pajak daerah merupakan *proxy* dari penerimaan pajak yang ada di dalam postur APBD suatu daerah (kabupaten/kota). Peningkatan atau penurunan penerimaan pajak daerah dapat menjadi indikasi adanya korupsi. Hal ini dikarenakan, pembayar pajak atau wajib pajak dapat memberikan suap kepada petugas pajak agar pajak yang dikenakan dapat dikurangi atau malah bisa sampai tidak membayar pajak sehingga dapat membuat anggaran penerimaan dari sisi pajak berkurang. Namun

dalam pelaporannya, penerimaan pajak justru meningkat. Oleh sebab itu, korupsi dalam pajak, bagaimanapun cara dan bentuknya, diwakilkan (*proxy*) oleh jumlah penerimaan pajak daerah yang ada di dalam laporan realisasi APBD kabupaten/kota.

Hipotesis 4: Variabel pajak (X4) diduga berpengaruh terhadap korupsi (Y) di 12 Ibukota Provinsi di Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010

C. METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian ini adalah kuantitatif-positivistik. Penelitian ini melihat fenomena korupsi dalam lingkup makro, yang bertujuan untuk men-generalisasi fenomena korupsi di 12 Ibukota Provinsi di Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang didapat dari lembaga *Transparency International* Indonesia (TII) untuk variabel korupsi dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk variabel PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pajak.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Pada data panel, unit individu (*cross section*) yang sama disurvei dari waktu ke waktu (*time-series*). Secara singkat, data panel memiliki dimensi ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, digunakan data panel seimbang karena jumlah *cross-section* (12 belas ibukota provinsi) memiliki observasi yang sama pada setiap waktu (empat tahun, mulai dari 2004, 2006, 2008 sampai 2010). Selain itu karena jumlah *cross-section* lebih besar daripada periode waktu, maka data panel dalam penelitian ini termasuk data panel pendek (Gujarati dan Porter, 2012:235-238)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi yang dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Sedangkan variabel independen terdiri dari PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku), pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan), pengeluaran pemerintah (belanja barang/jasa), dan pajak (pajak daerah).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi model Tobit. Regresi model Tobit ini digunakan mengingat variabel dependen yaitu korupsi diukur menggunakan Indeks Persepsi Korupsi yang bersifat laten atau kualitatif serta nilainya terbatas yaitu dari 0-10. Dalam model ini, variabel respon diobservasi hanya apabila kondisi tertentu terpenuhi (Gujarati dan Porter, 2012:221). Penggunaan teknik analisis regresi Tobit ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang mencari determinan korupsi yaitu penelitian Yilmaz dan Akiv (2011:161-169) yang meneliti determinan ekonomi korupsi di 25 negara Eropa menggunakan regresi Tobit. Hal tersebut dikarenakan variabel dependen yang digunakan yaitu korupsi berasal dari *Corruption Perception Index*. Persamaan regresi model Tobit dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$KOR = \alpha + \beta_1 PDRBkpt + \beta_2 Gr + \beta_3 Govex + \beta_4 Tax + \varepsilon$$

di mana :

Kor	= Korupsi (Indeks Persepsi Korupsi 0 –10)
PDRBkpt	= Produk Domestik Regional Bruto (atas harga berlaku dalam juta rupiah)
Gr	= Pertumbuhan Ekonomi Daerah (laju pertumbuhan dalam persen)
Govex	= Pengeluaran Pemerintah (belanja barang/jasa dalam milyar rupiah)
Tax	= Pajak (pajak daerah dalam milyar rupiah)
α	= konstanta/ <i>intercept</i>
β_0	= koefisien/ <i>slope</i>
ε	= <i>error</i>

Pengujian hipotesis menggunakan regresi model Tobit pada dasarnya hampir sama dengan uji hipotesis regresi OLS, namun terdapat perbedaan dalam menggunakan uji statistiknya. Dalam melihat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen pada regresi OLS yaitu menggunakan uji t dengan membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel serta melihat *p-value*. Sedangkan pada regresi Tobit, uji t tidak berlaku, melainkan yang digunakan adalah uji z, yaitu dengan membandingkan nilai z-statistik dengan z-tabel serta melihat *p-value* yang diterima. Hipotesis yang diajukan merupakan hipotesis dua arah. Oleh karena itu, untuk menjawab dugaan dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini peneliti membandingkan nilai z-statistik dengan nilai z-tabel yang berlaku untuk hipotesis dua arah serta dengan melihat *p-value* yang diterima sebesar 0.05 (5%).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia pada Era Desentralisasi

Dalam lingkup nasional, korupsi merupakan masalah yang klasik bagi bangsa Indonesia. Pada awal tahun tujuh puluhan Bung Hatta pernah menyatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia semakin membudaya (Baswir, 1997:118). Dari pernyataan tersebut dapat ditangkap bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Suatu hal yang aneh di mana masyarakat Indonesia utamanya merupakan masyarakat yang beragama, memiliki norma-norma dalam masyarakat dan berbudi pekerti tetapi *permissive* dengan korupsi. Sementara itu, Adam Malik menganggap bahwa membudayanya korupsi di Indonesia karena apapun yang dilakukan pada umumnya bisa diatur. Sebagai misal, berbagai kebijaksanaan itu bisa diatur agar hasilnya dapat dinikmati oleh segelintir para pengambil keputusan maupun para pelaku ekonomi tertentu yang dekat dengan lingkaran para pengambil keputusan. Korupsi pada dasarnya jangan dilihat dari sisi pencurian anggaran yang telah ditetapkan atau jangan hanya dilihat dari sisi kesalahan penggunaan anggaran dari atau untuk kepentingan umum dan beralih menjadi untuk kepentingan individu atau kelompok. Akan tetapi berbagai bentuk penyelewengan yang terjadi di dalam proses pengelolaan pembangunan juga harus dikategorikan ke dalam korupsi (Susanto, 2011:100).

Desentralisasi di Indonesia merupakan sebuah impian dan harapan masyarakat Indonesia setelah berakhirnya era Orde Baru. Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya menitikberatkan pada pembangunan di daerah masing-masing dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Namun, desentralisasi yang telah berlangsung kurang lebih selama satu dekade ini belum menunjukkan hasil seperti yang diinginkan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di samping berdampak positif juga tidak dapat dipungkiri berdampak negatif.

Lebih jauh, imbas dari lemahnya pengawasan dan penegakan kelembagaan pada era desentralisasi mengakibatkan semakin maraknya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para aparatur daerah. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melansir bahwa selama 2011, kasus korupsi di pemerintah kabupaten sebanyak 264 kasus. Selanjutnya pemerintah kota sebanyak 56 kasus dan pemerintah provinsi sebanyak 23 kasus (Setagu, 2013 dalam setagu.net). Total seluruh kasus korupsi pada 2011 sebanyak 343 kasus yang melibatkan pemerintah dari tingkat provinsi sampai kabupaten. Selaras dengan hal tersebut, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana mengungkapkan sekitar 70% kepala daerah atau 291 kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota terjerat kasus korupsi. Data tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 hingga Februari 2013. Kepala daerah tersebut terdiri atas gubernur (21 orang), wakil gubernur (7 orang), bupati (46 orang), walikota (41 orang) dan wakil walikota (20 orang) (Andryandy dan Sacawisastra, 2013 dalam koran-sindo.com)

Berbagai hasil penelitian baik teoritis maupun empiris terkait hubungan desentralisasi dan korupsi masih menjadi perdebatan. Hasil studi dan temuan berbagai penelitian yang berasal dari negara-negara di dunia menghasilkan jawaban yang tidak selalu konsisten dalam melihat hubungan apakah dengan adanya desentralisasi, praktik korupsi menjadi berkurang atau malah sebaliknya (Rinaldi., *et al.* 2007:15).

Ditambahkan oleh Bjedov.,*et al* (2010:24-25) bahwa ada berbagai macam situasi yang mungkin dalam hal desentralisasi dan korupsi. Ini menjelaskan hasil penelitian yang kontras, bahkan berlawanan pada beberapa literatur ekonomi baik teoritis dan empiris. Dalam beberapa kasus tertentu desentralisasi dapat mendisiplinkan pemerintah. Namun, hasilnya mungkin akan berbeda ketika kendala kelembagaan dan politik tertentu tidak diselesaikan dengan baik. Secara khusus, insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah memainkan peran penting dalam proses desentralisasi. Keselarasan kepentingan pemerintah daerah dengan kepentingan pemilih (masyarakat) dapat mengarahkan desentralisasi yang efektif bagi peningkatan kualitas pemerintah.

Deskripsi Korupsi pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia 2004, 2006, 2008, dan 2010

Hasil IPK pada 2004 menobatkan Banjarmasin sebagai kota yang terindikasi paling bersih dari korupsi dengan indeks 5,39 dan Jakarta sebagai kota yang terindikasi paling korup dengan indeks sebesar 3,87. Nilai maksimum IPK pada 2004 hanya mencapai angka 5,39 dan nilai minimum di angka 3,87. Hal ini menandakan bahwa indikasi korupsi pada awal peluncuran IPK di 12 Ibukota provinsi 2004 masih tergolong tinggi karena nilai IPK masih terletak di antara angka 3 sampai 5,

jauh dari angka 10 serta dari nilai rata-rata juga masih terdapat tujuh kota dari dua belas ibukota provinsi yang nilainya di bawah rata-rata

Hasil IPK pada 2006 menunjukkan Yogyakarta sebagai kota yang terindikasi paling bersih dari korupsi dengan nilai indeks 5,59 dan Denpasar sebagai kota yang terindikasi paling korup dengan nilai indeks 3,67. Nilai maksimum IPK pada tahun 2006 mencapai angka 5,59 yang berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya 2004 (5,39) sebesar 0,2. Sedangkan nilai minimum di angka 3,67 yang berarti ada penurunan dari tahun sebelumnya 2004 (3,87) juga sebesar 0,2. Hal tersebut menandakan adanya rentang yang semakin panjang antara nilai IPK pada 2004 dan 2006. Selain itu indikasi korupsi pada 2006 juga belum terlihat ada kemajuan berarti karena nilai IPK masih terletak di antara angka 3 sampai 5, lebih mendekati angka 0 daripada angka 10.

Hasil IPK tahun 2008 menunjukkan bahwa Yogyakarta kembali menjadi kota yang terindikasi paling bersih dari korupsi dengan nilai indeks 6,43 dan Pekanbaru menjadi kota yang terindikasi paling korup dengan nilai indeks 3,55. Pada 2008 nilai minimum berada di angka 3,55 yang berarti ada penurunan dari tahun sebelumnya 2006 (3,67) sebesar 0,12. Hal tersebut menandakan adanya rentang yang semakin panjang antara nilai IPK pada 2004, 2006 sampai 2008. Indikasi korupsi pada 2008 terlihat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terbukti dengan adanya pencapaian menembus angka 6,43.

Hasil IPK 2010 menunjukkan Denpasar sebagai kota yang terindikasi paling bersih dari korupsi dengan nilai indeks 6,71 dan Pekanbaru sebagai kota yang terindikasi paling korup dengan nilai indeks 3,61. Nilai maksimum IPK pada 2010 mencapai angka 6,71 yang berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya 2008 (6,43) sebesar 0,28. Sedangkan nilai minimum berada di angka 3,61 yang berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya 2008 (3,55) sebesar 0,06. Hal yang menarik bahwa pada 2010, nilai minimum mengalami peningkatan daripada 3 tahun sebelumnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Hasil ini masih menandakan bahwa rentang nilai indeks pada 2010 masih berada di kisaran angka 3 sampai angka 6. Artinya belum ada peningkatan berarti selama empat tahun dilaksanakannya survei IPK terhadap pengentasan korupsi di 12 Ibukota Provinsi.

Rangkuman Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi 12 Ibukota Provinsi Indonesia (2004, 2006, 2008 dan 2010)

Ibukota Provinsi	Tahun			
	2004	2006	2008	2010
Banjarmasin	5,39	4,93	5,11	5,20
Denpasar	4,44	3,67	4,25	6,71
Jakarta	3,87	4,00	4,06	4,43
Makassar	5,31	5,25	4,70	3,97
Manado	5,12	4,87	3,98	5,35
Medan	4,09	4,67	3,84	4,17
Padang	4,83	5,39	4,64	5,07
Palembang	4,67	4,60	3,87	4,70
Pekanbaru	4,37	4,43	3,55	3,61
Semarang	4,17	5,28	4,58	5,00
Surabaya	3,93	4,40	4,26	3,94
Yogyakarta	4,51	5,59	6,43	5,81
Rata - rata	4,56	4,76	4,44	4,83
Nilai Maksimum	5,39	5,59	6,43	6,71
Nilai Minimum	3,87	3,67	3,55	3,61

Sumber : Data diolah dari www.ipkindonesia.com (diakses pada Juni 2013)

Hasil Analisis dan Interpretasi Regresi Tobit

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa pemilihan regresi Tobit dalam menganalisis data dalam penelitian ini dikarenakan variabel dependen (Y) bersifat kualitatif yaitu korupsi yang diukur berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang berkisar dari angka 0-10. Batasan nilai 0-10 ini juga menjadi dasar bahwa penggunaan regresi model Tobit lebih tepat dibandingkan dengan regresi OLS biasa. Analisis regresi Tobit ini dihitung menggunakan software Eviews 6.0. Secara matematis, hasil estimasi regresi model Tobit sebagai berikut:

$$\text{KORUPSI} = 6.01279285852 - 0.0191469997898 * \text{PDRBKPT} - 0.144247254389 * \text{GR} + 0.00566448878572 * \text{GOVEX} - 0.00334093455773 * \text{TAX}$$

Untuk lebih memudahkan interpretasi hasil estimasi di atas, hasil perhitungan model Tobit menggunakan software Eviews 6.0 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Model Tobit

Variabel	Koefisien	z-statistik	p-value
C	6.012793	14.79920	0.0000
PDRBkpt	-0.019147	-2.263045	0.0236
GR	-0.144247	-2.612450	0.0090
Govex	0.005664	1.442100	0.1493
Tax	-0.003341	-1.418198	0.1561
Likelihood Ratio (Chi-square statistik) = 13.65301 Prob. Chi-square = 0.0085			

Sumber: Data dimodifikasi dari hasil Eviews 6.0 (2013)

Hasil estimasi regresi Tobit di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dilihat bahwa hasil *p-value* pada variabel PDRB per kapita (0.02367) dan pertumbuhan ekonomi (0.0090) signifikan secara statistik pada tingkat 5%, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah (0.1493) dan pajak daerah (0.1561) tidak signifikan secara statistik pada tingkat 5%
- Untuk melihat tingkat kebaikan model secara bersama-sama digunakan Likelihood Ratio (LR). *Likelihood Ratio* (LR) ini mirip dengan uji F pada analisis OLS. Hasil uji LR sebesar 13,65301 dengan nilai *p-value* sebesar 0,0085 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yang diterima sebesar 0.05 (5%). Dengan demikian variabel-variabel independen (PDRB per kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah serta Pajak) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Korupsi)
- Koefisien regresi variabel PDRBkpt sebesar -0.019147 menunjukkan bahwa hubungan PDRB per kapita dengan korupsi negatif. Kenaikan pada tingkat PDRB per kapita menyebabkan probabilitas korupsi meningkat (nilai indeks mendekati angka 0)
- Koefisien regresi variabel GR menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan korupsi negatif. Kenaikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi menyebabkan probabilitas korupsi meningkat (nilai indeks mendekati angka 0)
- Koefisien regresi variabel Govex sebesar 0.005664 menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah dengan korupsi positif. Kenaikan pada pengeluaran pemerintah (barang/jasa) menyebabkan probabilitas korupsi menurun (nilai indeks mendekati angka 10)
- Koefisien regresi variabel Tax sebesar -0.003341 menunjukkan bahwa hubungan pajak dengan korupsi negatif. Kenaikan pada penrimaan pajak daerah menyebabkan probabilitas korupsi meningkat (nilai indeks mendekati angka 0)

Pengujian Hipotesis

Dalam regresi model Tobit, menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen (secara parsial) menggunakan nilai statistik z. Hal ini disebabkan model Tobit menggunakan asumsi distribusi normal sehingga yang digunakan adalah nilai z. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai z tabel dengan z-statistik (hitung) dan juga melihat nilai *p-value* dengan tingkat kesalahan yang diterima (5%). Nilai z-tabel untuk tingkat kesalahan 5% dengan hipotesis dua arah adalah sebesar 1.960.

Tabel 3. Hasil uji hipotesis penelitian

Variabel	z-statistik	z-tabel	p-value	Keterangan
PDRBKPT	-2.263045	1.960	0.0236	Berpengaruh dan signifikan
GR	-2.612450	1.960	0.0090	Berpengaruh dan signifikan
Govex	1.442100	1.960	0.1493	Tidak berpengaruh
Tax	-1.418198	1.960	0.1561	Tidak Berpengaruh

Sumber : Data dimodifikasi dari hasil Eviews 6.0 (2013)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap probabilitas korupsi di 12 Ibukota provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008 dan 2010. Hasil itu membuktikan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah serta pajak tidak berpengaruh terhadap korupsi di 12 Ibukota provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008 dan 2010. Hasil itu membuktikan bahwa hipotesis 3 dan hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dua hipotesis diterima dan dua hipotesis lainnya ditolak.

Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Korupsi

Merujuk pada estimasi regresi Tobit pada penelitian ini ditemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh dan signifikan terhadap korupsi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rehman dan Naveed (2006:27-59), Saha (2009:1-187), Yilmaz dan Akiv (2011:161-169), E_LBahnasawy dan Revier (2012:312-333) serta Silaen dan Sasana (2013:1-6). Namun apabila dilihat arah pengaruhnya yang negatif maka hasil penelitian ini mirip dengan hasil penelitian E_LBahnasawy dan Revier (2012:312-333). Pengaruh negatif disini mempunyai arti bahwa kenaikan PDRB per kapita atau semakin baiknya pembangunan dalam suatu daerah dan kesejahteraan semakin meningkat tidak menjadi jaminan akan menurunkan korupsi. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan semakin meningkatnya PDRB per kapita daerah yang berarti probabilitas terjadinya korupsi juga semakin meningkat bukan berarti hal yang sebaliknya juga dapat berlaku. Artinya tidak bisa dikatakan bila PDRB per kapita turun maka kemungkinan korupsi terjadi juga akan turun. Perlu kehati-hatian dalam menginterpretasi hasil tersebut.

Hasil tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia, terutama di 12 Ibukota provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini, semakin tinggi pembangunan ekonomi dalam suatu daerah dan semakin sejahtera masyarakat tidak menjadi jaminan untuk mereduksi korupsi. Virus korupsi dapat semakin menyebar seiring pembangunan ekonomi yang lebih baik di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Lihat saja misalnya bahwa kasus-kasus korupsi yang diungkap oleh KPK melibatkan orang-orang yang secara ekonomi bisa dikatakan sejahtera dengan segala jabatan maupun pendapatan yang diterima. Namun, toh itu tidak menjadikan mereka sadar untuk tidak melakukan korupsi, melainkan menumbuhkan keinginan-keinginan baru untuk melaksanakan korupsi agar hasil dan keuntungan yang didapat semakin besar.

Lebih lanjut PDRB per kapita (pendapatan per kapita) dapat diidentikkan dengan proses demokrasi suatu negara. Semakin tingginya pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara maka tingkat demokrasi semakin membaik. Demokrasi yang baik dapat melahirkan masyarakat yang semakin sadar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh negaranya (maupun daerah, apabila yang dimaksud adalah demokrasi dalam desentralisasi dan otonomi daerah), salah satunya dalam hal permasalahan korupsi. Merujuk pada penjelasan Boediono (2008:1-17) selama pendapatan per kapita suatu negara belum memenuhi batas 6600 US dollar atau setara dengan Rp 66.000.000 (kurs 1 US dollar sama dengan Rp.10.000), maka demokrasi masih rentan untuk diaplikasikan dengan baik, karena menurut Boediono di atas pendapatan per kapita Indonesia masih sekitar di angka 4.400 US dollar (Rp 44.000.000). Apabila batasan tersebut dicoba diaplikasikan dengan PDRB per kapita rata-rata dari 12 Ibukota Provinsi selama 2004, 2006, 2008 dan 2010 didapatkan angka sebesar Rp 24.710.000 yang artinya masih jauh dari batas demokrasi. Sungguh pun begitu, tidak ada jaminan yang pasti bahwa suatu ketika pendapatan per kapita di Indonesia (secara nasional) maupun di daerah (12 Ibukota provinsi) meningkat hingga mencapai batas 6600 US dollar, korupsi akan menurun.

Semakin membaiknya pendapatan per kapita suatu masyarakat dalam suatu daerah hingga akhirnya mencapai kesejahteraan ekonomi, tidak menjadi jaminan bahwa orang tidak melakukan korupsi. Hal inilah yang sering terjadi di sisi agen (pemerintah dan legislatif). Pemerintah ataupun DPRD yang notabene dipilih oleh rakyat dan bertugas melayani masyarakat, malah berpikir untuk dirinya sendiri. Pejabat-pejabat daerah tersebut lebih mengutamakan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya, padahal mereka sendiri sudah bisa dikatakan sejahtera. Pada titik ini, prinsipal (masyarakat) yang pada hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi, menjadi pihak yang dirugikan. Gambaran ini sepertinya telah jelas memaparkan bahwa belum tentu ketika seseorang itu sejahtera (dalam hal ini di Indonesia) maka dia cenderung akan meninggalkan praktik korupsi. Kasus tersebut mungkin memang bisa terjadi, apalagi jika melihat penjelasan sebelumnya yang mengatakan bahwa pendapatan per kapita Indonesia masih belum berada pada titik aman batas tercapainya sebuah demokrasi yang berkualitas. Sehingga dengan begitu seseorang masih berpikir

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, termasuk dengan melakukan korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah para pejabat daerah (dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ini) merupakan orang-orang yang hanya memikirkan “perutnya” saja. Sedangkan jika melihat masyarakat disekitar masih banyak yang berada di garis kemiskinan. Akhirnya, merujuk pada teori biaya sosial korupsi yang diajukan oleh Klitgaard, apabila korupsi sudah menjadi kebiasaan para petinggi (daerah), maka biasa sosial berupa norma-norma dan moral masyarakat dalam suatu daerah tersebut lama kelamaan juga akan hancur. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa sehingga pada nantinya akan tercipta sistem yang korup, tidak hanya pada tataran agen (pemerintah dan legislatif) tetapi juga pada tataran prinsipal (masyarakat).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Korupsi

Berdasarkan estimasi regresi Tobit pada penelitian ini ditemukan bahwa laju pertumbuhan sebagai *proxy* untuk melihat pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rehman dan Naveed (2006:27-59) serta Yilmaz dan Akiv (2011:161-169). Hal ini dapat diakibatkan karena adanya perbedaan karakteristik wilayah atau daerah yang menjadi sampel dalam penelitian. Banyak penelitian yang melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan korupsi menggunakan analisis data antar negara, sedangkan dalam penelitian ini sampel yang dilakukan adalah dalam lingkup regional atau daerah.

Apabila dilihat arah pengaruhnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Hoa (2010:160-161), di mana dalam salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula korupsi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013:52) juga menemukan hal yang sama bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan nasional Indonesia dari tahun ke tahun (diukur menggunakan PDB atas dasar harga konstan) akan semakin tinggi tingkat korupsinya. Semakin maju atau tumbuh perekonomian suatu negara tanpa adanya upaya untuk menekan tindak kejahatan korupsi maka akan semakin menjadi lahan subur untuk melakukan praktek korupsi.

Pertumbuhan ekonomi di daerah belum tentu menjadi garansi bahwa korupsi akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi menandakan semakin baiknya daerah mengelola potensi dan sumber daya yang ada untuk kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa. Dengan begitu hasil dan keuntungan dari sumber daya tersebut dapat membantu perekonomian daerah yang salah satunya ditandai dengan peningkatan angka riil pertambahan barang dan jasa. Keuntungan dari semakin tumbuhnya perekonomian daerah inilah yang berpotensi menjadi ladang-ladang korupsi. Selain itu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi ini dapat dilihat dari hubungan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang masuk ke daerah dengan potensi terjadinya korupsi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka diasumsikan aliran dana investasi yang masuk ke daerah semakin besar (*ceteris paribus*). Apabila tidak dibarengi dengan mekanisme yang jelas terkait alokasi dari dana investasi tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan bagi seseorang atau kelompok tertentu menggunakan dana tersebut jauh dari tujuan awalnya (korupsi).

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan yang erat dengan infrastruktur. Seperti yang dikatakan oleh Straub and Hagiwara (2011:119) bahwa infrastruktur memiliki peranan penting dalam membantu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin baik infrastruktur suatu daerah, maka kegiatan ekonomi akan berjalan semakin lancar. Sebagai contoh, listrik yang merupakan energi pokok bagi sektor industri merupakan suatu hal mutlak yang harus diperhatikan oleh daerah apabila sektor industri di daerah tersebut semakin maju. Contoh lain dari infrastruktur yang penting adalah jalan dan jembatan. Penambahan akses atau perbaikan jalan maupun jembatan adalah wajib bagi setiap daerah agar proses distribusi semakin lancar. Dengan begitu, kegiatan ekonomi di daerah dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Sayangnya, anggaran untuk infrastruktur ini seringkali menjadi lahan yang subur bagi terciptanya korupsi. Hal ini masuk akal, karena nominal dana atau anggaran dalam penyediaan infrastruktur ini tidak kecil, tetapi sangat menggiurkan. Jika menyimak laporan Bank Dunia yang bertajuk “*Curbing Fraud, Corruption and Collusion in the Roads Sector*” (2011) dalam Yustika (2012, 2012:256-257) maka proporsi anggaran yang di-mark-up di negara berkembang rata-rata 40% (di negara maju, seperti Jepang, kisaran mark-up sebesar 20%).

Penjelasan tersebut di atas memberi gambaran bahwa apabila suatu daerah perekonomiannya tumbuh dengan cepat, yang disertai dengan aliran investasi baik asing maupun lokal, tidak menjadi jaminan bahwa daerah tersebut bebas dari korupsi. Justru perlu dicurigai apabila dalam aliran dana investasi tersebut, ternyata dalam proses tender (pembuatan jalan layang misalnya), yang menjadi

pemenang adalah suatu perusahaan yang dekat dengan pemerintah. Pada tataran ini, *rent-seeking* menjadi sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana prinsipal dan agen menggunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meraup keuntungan pribadi (korupsi) pada saat potensi pertumbuhan ekonomi daerah begitu tinggi. Sehingga, hasil yang dapat di korupsi semakin banyak.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Korupsi

Hasil estimasi regresi menggunakan model Tobit didapatkan bahwa pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap probabilitas terjadinya korupsi pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia 2004, 2006, 2008 dan 2010. Hasil ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Del Monte dan Papagni (2007:379-396) di mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah barang dan jasa berpengaruh terhadap korupsi di Italia pada 1963-2001. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena dalam penelitian tersebut data yang digunakan merupakan data statistik kejahatan korupsi serta rentang tahun yang lebih panjang (39 tahun) dan terdiri dari 20 daerah. Sedangkan dalam penelitian ini korupsi diukur menggunakan Indeks Persepsi Korupsi serta rentang tahun yang lebih pendek (4 tahun) dan hanya terdiri dari 12 daerah.

Perbedaan hasil penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh KPPOD (2012:3-14) dan Mauleny (2011:12-15) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor yang berpotensi menyuburkan praktik korupsi. Dalam menyikapi hal ini, peneliti memaknai bahwa tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa dalam penelitian ini dikarenakan sumber data yang peneliti gunakan merupakan realisasi anggaran APBD dari 12 ibukota provinsi, di mana belanja barang dan jasa dilihat dari sebuah angka. Sedangkan apabila merujuk pada penelitian dari KPPOD (2012:3-14) dan Mauleny (2011:12-15), korupsi dalam lingkup belanja barang jasa (pengadaan barang dan jasa) lebih dilihat secara kualitatif, yaitu dari perilaku individu dan sistem. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa tidak berpengaruhnya variabel pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa dalam penelitian ini lebih disebabkan banyak faktor-faktor lain diluar dari nilai jumlah belanja barang dan jasa yang terdapat dalam laporan APBD.

Pengaruh Pajak Terhadap Korupsi

Dari hasil estimasi regresi menggunakan model Tobit didapatkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap probabilitas terjadinya korupsi pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia 2004, 2006, 2008 dan 2010. Sama halnya dengan pengeluaran pemerintah, korupsi pada pajak (penerimaan pajak daerah) tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dengan hanya melihat angka yang tertera dalam laporan APBD saja. Seperti yang dikatakan oleh Basri dan Munandar (2009:324) bahwa pelaksanaan korupsi dalam bentuk negosiasi pajak pelaksanaannya sudah sistemik, sehingga sulit untuk menemukan sumber-sumbernya. Oleh sebab itu, peneliti memaknai hasil temuan dalam penelitian ini bahwa mencari penyebab korupsi pada kasus pajak tidak bisa hanya dengan menggunakan data-data yang berupa angka saja. Perlu adanya data kualitatif, dengan melihat perilaku individu serta sistem yang berjalan pada kasus pajak di daerah-daerah.

Di samping itu, tidak berpengaruh signifikannya pajak daerah ini bisa disebabkan karena nilai pajak daerah yang digunakan merupakan nilai agregat yang berasal dari komponen-komponen pembentuk pajak daerah kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tidak menutup kemungkinan apabila salah satu atau beberapa komponen pajak daerah itu diteliti satu per satu secara empiris kemungkinan hasilnya dapat signifikan dalam menjelaskan penyebab korupsi di daerah, utamanya di Ibukota Provinsi Indonesia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, PDRB per kapita memiliki pengaruh terhadap korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010. Kenaikan PDRB per kapita berdampak pada probabilitas kenaikan tingkat korupsi (*ceteris paribus*). Semakin tinggi pembangunan ekonomi dalam suatu daerah dan semakin sejahtera masyarakat tidak menjadi jaminan untuk mereduksi korupsi. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010. Kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdampak pada probabilitas semakin tingginya tingkat korupsi (*ceteris paribus*). Semakin maju atau tumbuh perekonomian suatu daerah tanpa adanya upaya untuk menekan tindak kejahatan korupsi maka akan semakin menjadi lahan subur untuk melakukan praktek korupsi. *Ketiga*, pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010. Pengeluaran pemerintah disini dilihat dari belanja barang dan jasa. Peneliti berasumsi bahwa tidak adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap korupsi dalam penelitian ini dikarenakan untuk melihat korupsi pada pengeluaran pemerintah tidak cukup dengan menggunakan data nilai jumlah belanja barang/jasa serta menggunakan data yang bersifat kuantitatif saja. *Keempat*, pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi di 12 Ibukota Provinsi Indonesia pada 2004, 2006, 2008, dan 2010. Peneliti berasumsi bahwa tidak adanya pengaruh pajak daerah terhadap korupsi dalam penelitian ini dikarenakan untuk melihat korupsi pada pajak tidak cukup dengan menggunakan data pajak daerah secara agregat

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, perlu adanya peningkatan pendapatan per kapita hingga mencapai batas tertentu (6600 US dollar) secara nasional agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan bertahan lama. Proses demokrasi tersebut juga harus diiringi dengan pendidikan antikorupsi secara meluas di setiap lapisan masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar budaya laten korupsi di tataran masyarakat Indonesia lama kelamaan dapat terkikis. Selain itu, kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dibarengi dengan peningkatan investigasi dan pemberantasan kasus-kasus korupsi. Hal ini dimaksudkan agar persepsi korupsi masyarakat dunia terhadap Indonesia, secara umum, dapat menjadi lebih baik (Indonesia bersih dari korupsi). *Kedua*, berkaitan dengan hasil penelitian dimana pengeluaran pemerintah dan pajak daerah yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini, diperlukan penelitian selanjutnya untuk melihat pengeluaran pemerintah secara keseluruhan tidak hanya dilihat dari barang dan jasa saja. Demikian juga dengan pajak daerah, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya melihat pajak daerah secara agregat, namun dapat dilihat komponen-komponen pembentuk pajak daerah tersebut. Selain itu, korupsi pada tataran pengeluaran pemerintah dan pajak perlu ditinjau secara kualitatif, karena tidak mudah untuk mengidentifikasi korupsi dengan menggunakan data kuantitatif (angka-angka) saja. *Ketiga*, penelitian mengenai determinan korupsi memerlukan suatu studi yang komprehensif melibatkan disiplin ilmu lain tidak sebatas hanya pada ekonomi saja. Penelitian mengenai determinan korupsi biasanya bersifat kondisional pada kondisi tertentu dan hasil dari penelitian tersebut menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk penelitian selanjutnya. Oleh sebab itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan variabel-variabel lain baik secara empiris maupun teoritis untuk melihat determinan korupsi terutama di Indonesia. *Keempat*, perlu adanya perluasan cakupan wilayah atau daerah penelitian dalam menyusun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang tidak hanya terbatas pada kota/kabupaten saja, tetapi juga dalam lingkup provinsi. Selain itu rentang waktu berlakunya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang 2 tahunan (binual) sebaiknya diperbarui menjadi tahunan (annual) seperti *Corruption Perception Index* yang diterbitkan oleh *Transparency International*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Susan Rose. 2000. *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*. Terjemahan oleh Toenggoel P. Siagian. 2006. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Andryandy, Tommi dan Sacawisastra, Krisiandy. 2013. 291 Kepala Daerah Terlibat Korupsi. <http://www.koran-sindo.com>. Diakses pada 26 Juni 2013
- Arikan, Gulsun.G. 2004. Fiscal decentralization: a remedy for corruption. *International Tax and Public Finance*; Vol.11, (No.2) ABI/INFORM Complete pg. 175
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Staistik
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, Faisal dan Munandar, Haris. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bjedov, Tjasa., Thierry Madiès., Simon Schnyder. 2010. Corruption and decentralization: What economist have say about it. *Urban Public Economics Review* (No.13) : 12-32
- Boediono. 2008. Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol.5 (No.1) : 1-17
- Del Monte, Alfredo dan Papagni, Erasmo. 2007. The determinants of corruption in Italy: Regional Panel Data Analysis. *European Journal of Political Economy*, Vol.23 : 379-396
- E_LBahnasawy, Nasr. G dan Fevier, Charles F. The determinants of corruption: cross country panel data analysis. *The Developing Economies*. Vol.50, (No.4) : 311-33
- Fisman, Raymond and Gatti, Roberta. 2000. Decentralization and corruption: evidence across countries. *Journal of Public Economics* (No.83) : 325–345
- Gujarati, Damodar dan Porter, Dawn C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Terjemahan oleh Raden Carlos Mangunsong. 2009. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Gunawan, Jamil. *et all*. 2005. *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hamid, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM
- Hoa, Tran Van. 2010. Development and corruption in Asia: a substantive econometric analysis for practical policy use. *National Anti-Corruption Comission (NACC) Special Issue*, Vol.3, (No.2)
- Klitgard, Robert., Ronald Maclean-Abaroa., H. Lindsey Parris. 2000. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan oleh: Masri Maris. 2002. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- KPPOD. 2012. Mewujudkan Pembangunan Eknomi Bagi Kesejahteraan Rakyat. *KPPOD Brief* Edisi September-Oktober 2012
- Lessmann, Christian and Markwardt, Gunther. 2009. One size fits all? decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. *World Development*, Vol.38, (No. 4) : 631–646

- Mauleny, Ariesy Tri. 2011. Urgensi RUU Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Good Governance. Dalam Asep Ahmad Saefuloh (ed), *Instrumen Pembangunan Ekonomi Dalam Program Legislasi Bidang Ekonomi* (hlm. 12-15). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Jakarta
- Nugroho, SBM. 2013. Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.1, (No.1)
- Rehman, Hafeez dan Naveed, Amjad. 2007. Determinants of corruption and its relation to GDP (a panel study). *Journal of Political Studies*, Vol.XII, Winter: 27-59
- Rinaldi *et all.* 2007. Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah. *Justice for the Poor Project*. Bank Dunia
- Safi'i, H.M. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Setagu. 2013. Data Korupsi 2011 versi ICW. <http://setagu.net/>. Diakses pada 26 Juni 2013)
- Shabbir, Ghulam dan Anwar, Mumtaz. 2007. Determinants of Corruption in Developing Countries. *HWI (Hamburg Institute of International Economics) Research Paper*
- Silaen, Yuana Friska dan Sasana, Hadi. 2013. Analisis Determinan Korupsi Di Era Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, Vol.2 (No.1) : 1-6
- Straub, Stephanie dan Akiko Terada-Hagiwara. 2011. Infrastructure and Growth in Developing Asia. *Asian Development Review*, Vol.28 (No.1): 119-156
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Susanto, Hari. 2011. *Underground Economy*. Jakarta: Baduose Media
- Transparency International Indonesia. *Laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2010*. <http://www.ipkindonesia.org>. Diakses pada 1 Juni 2013
- Wijayanto dan Zachdie, Ridwan. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prosepek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Yilmaz, A dan Akiv, M. 2011. Determinants of economic corruption: a cross-country data analysis. *International Journal of Business and Social Science* Vol.2 (No.13). Special Issue July 2011
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing